

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Maluku 2014

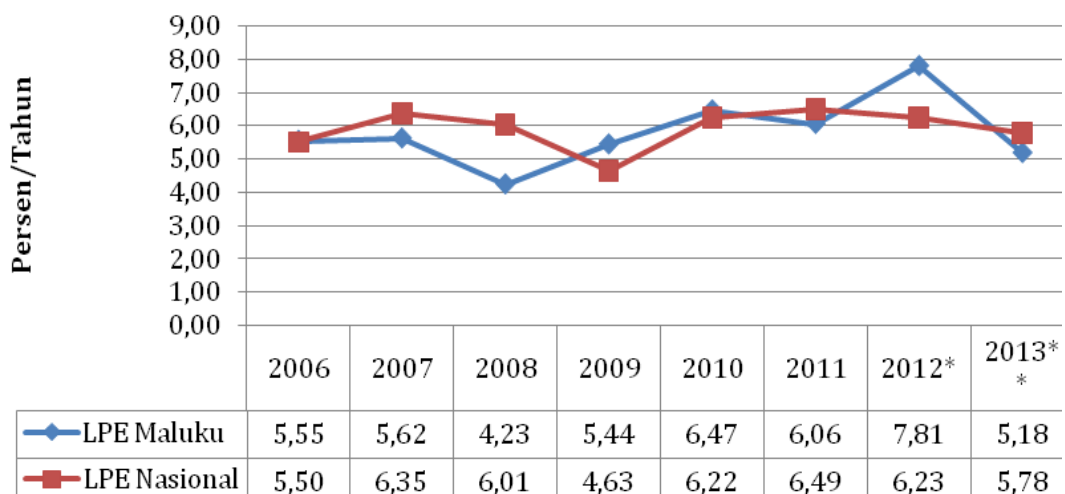
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam terutama di kelautan. Untuk meningkatkan perekonomian di wilayah ini, kondisi geografis di Maluku harus diberdayakan secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja perekonomian Maluku selama periode 2006-2013 berfluktuatif dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,80 persen (Gambar 1). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) pada periode yang sama yaitu sebesar 5,9 persen. Walaupun memiliki laju pertumbuhan yang rendah namun kontribusi Provinsi Maluku terhadap pembentukan PDRB Wilayah Maluku sebesar 62,38 persen, lebih besar daripada Provinsi Maluku Utara. Di tingkat nasional Provinsi Maluku menyumbang sebesar 0,17 persen terhadap pembentukan PDB nasional.

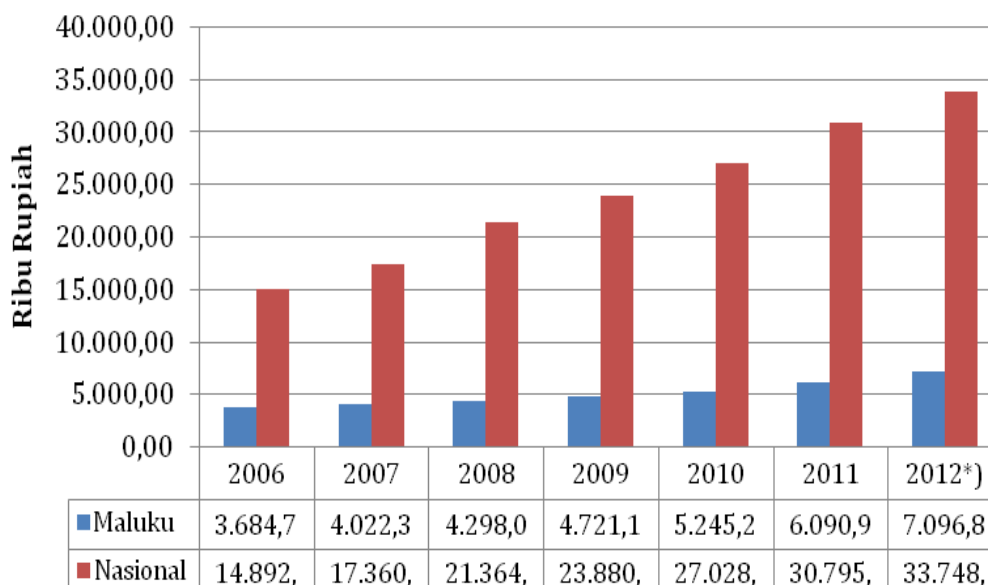
**Gambar 1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000**



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Maluku selama kurun waktu 2006-2012 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di provinsi ini walaupun masih jauh dari rata-rata nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Maluku dan PDB nasional sebesar 24,74 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 21,03 persen (Gambar 2). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Gambar 2**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

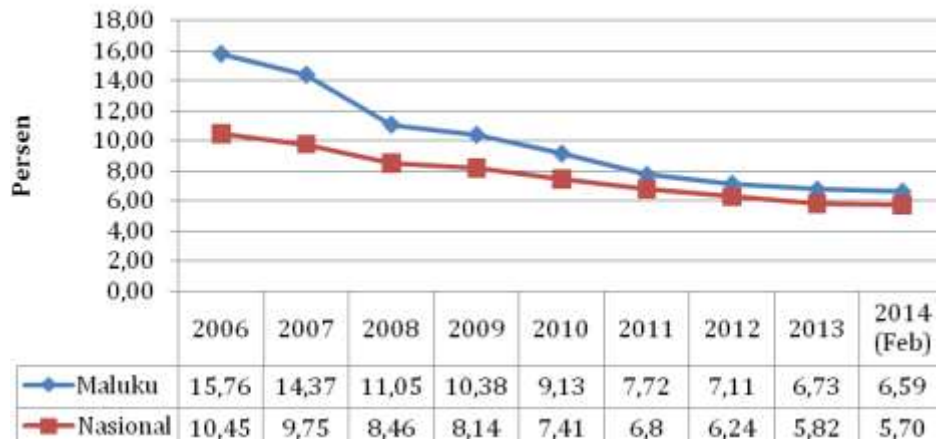


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Maluku selama 2006-2013 berkurang sebesar 9,03 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Maluku Utara cenderung menurun. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT Maluku termasuk tinggi karena berada di atas rata-rata TPT nasional. Tingginya tingkat pengangguran seiring dengan pendapatan per kapita yang rendah, yang mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

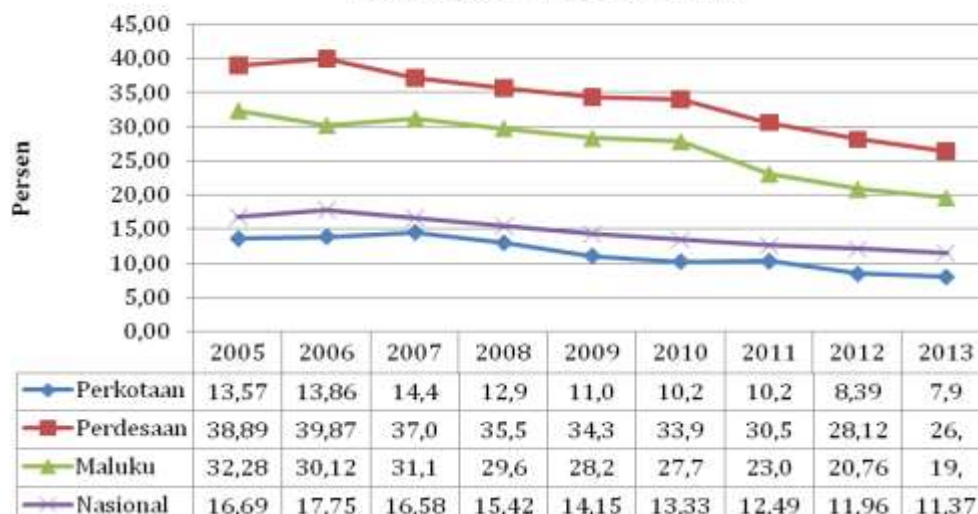


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini cenderung menurun, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 4). Secara nasional persentase penduduk miskin di Maluku tergolong tinggi. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di nasional mencapai 11,37 persen, sedangkan di Maluku mencapai 19,4 persen. Rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, rendahnya akses informasi dan akses pasar dalam memanfaatkan sumber daya alam menyebabkan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber daya alam harus optimal pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

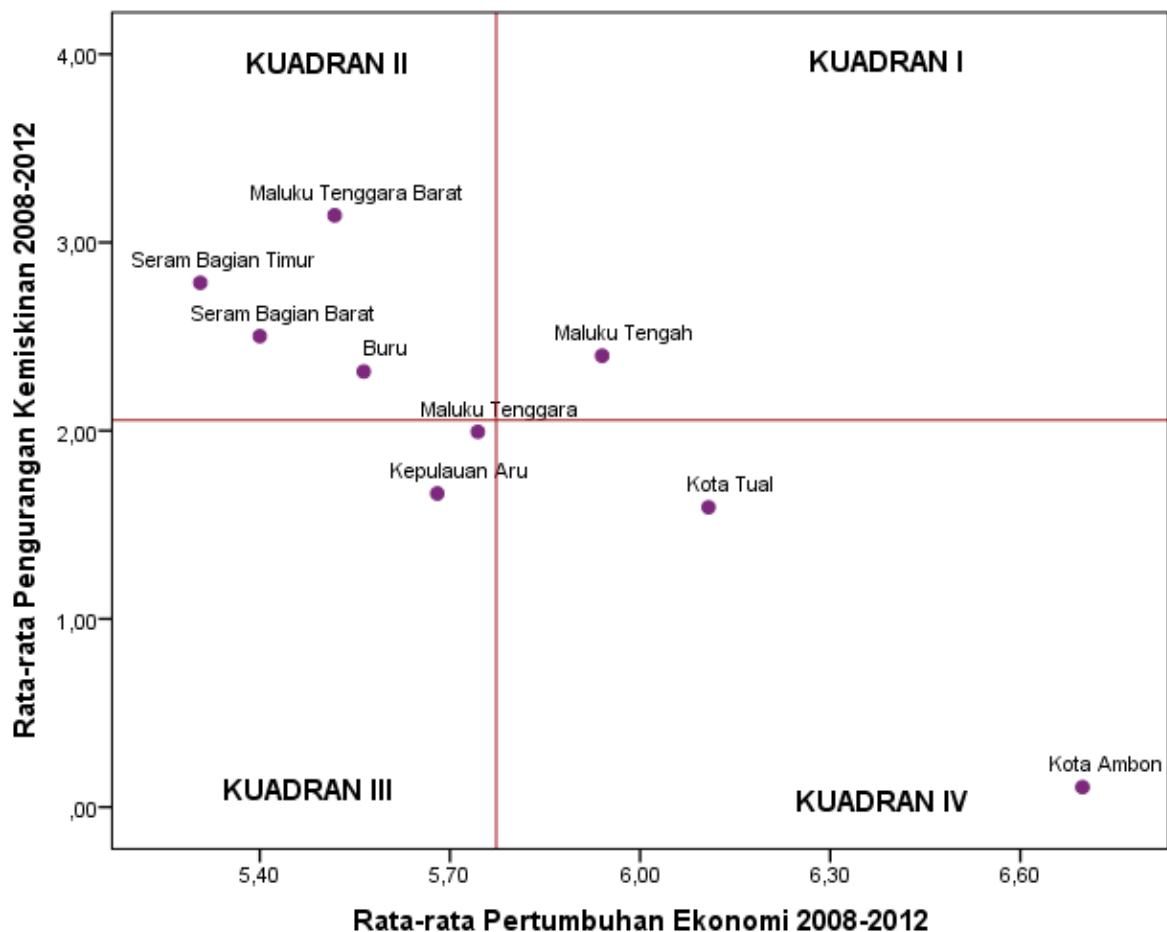
## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Maluku menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Maluku Tengah termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

**Gambar 5**  
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Seram bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Buru terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

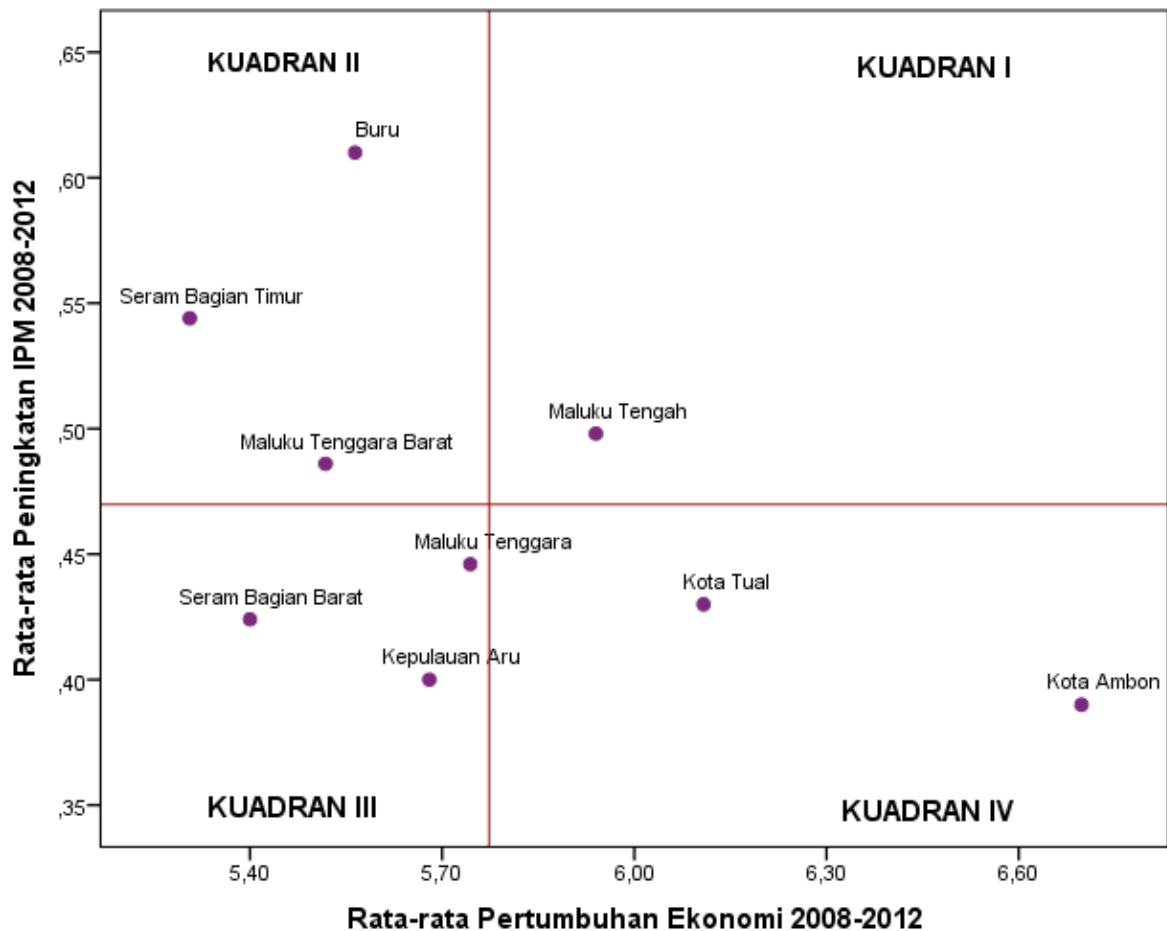
*Keempat*, Kota Tual dan Kota Ambon terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Maluku berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara Barat yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

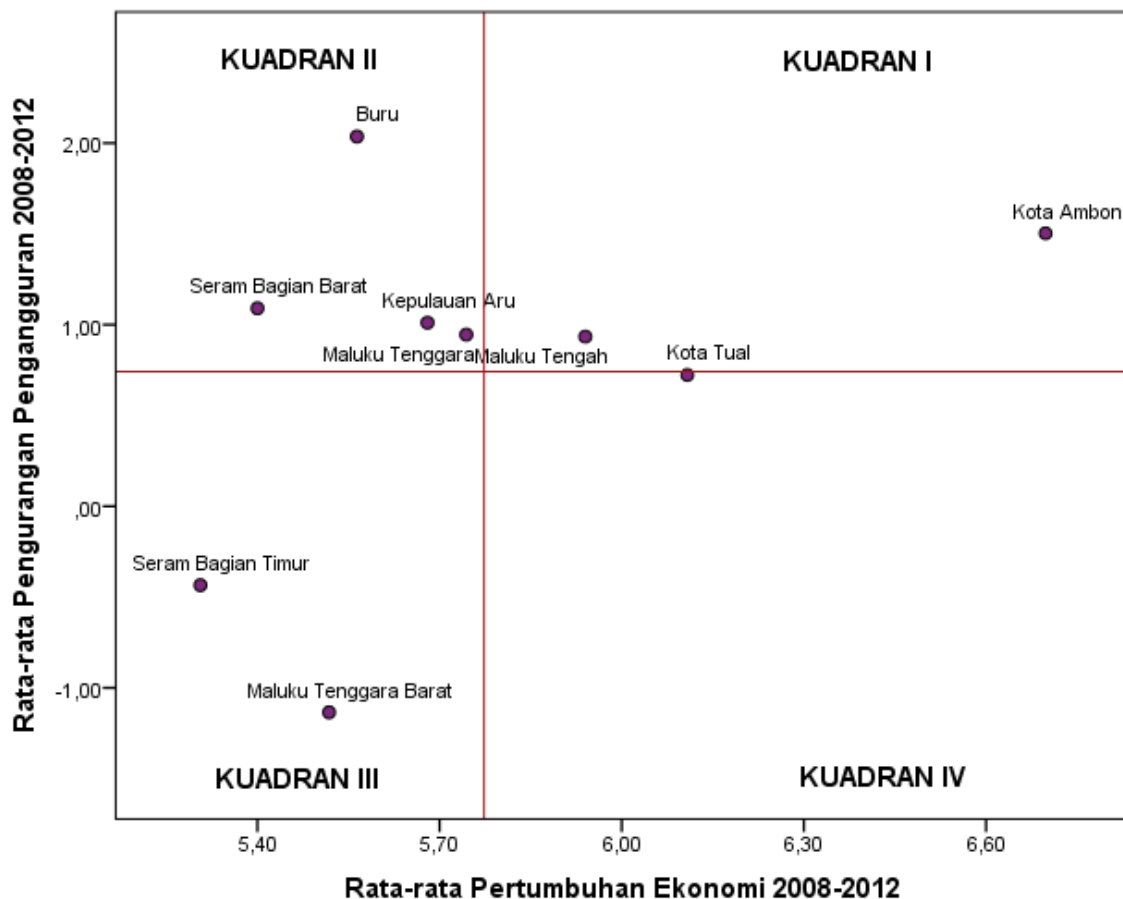
*Keempat*, Kabupaten Kota Ambon dan Kota Tual terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.



### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Maluku menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

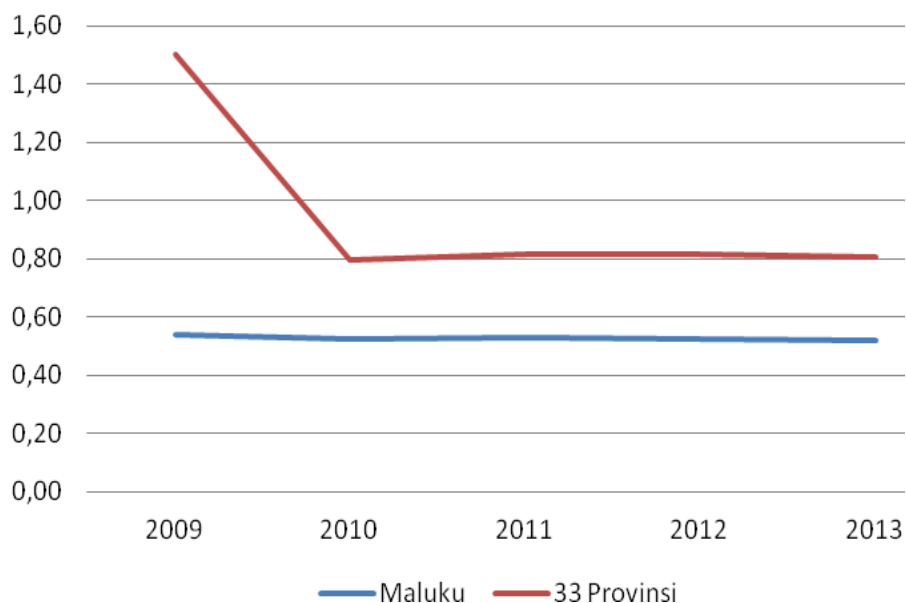
*Ketiga*, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

*Keempat*, Kabupaten Kota Tual terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Maluku yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 memiliki kecenderungan semakin meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Maluku berkategori rendah. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Maluku adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2007-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Maluku terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Pendapatan perkapita di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku tertinggi dibandingkan kota dan kabupaten lainnya. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian Kota Ambon, pendapatan perkapita juga mengalami pertumbuhan positif karena berperannya sektor-sektor ekonomi potensial seperti perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Kondisi tersebut telah memberikan akses pada penyediaan lapangan usaha baru melalui investasi sektor swasta sehingga tercipta peluang untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita di daerah ini.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2007-2012 (000/jiwa)**

| <b>Kab/ Kota</b>      | <b>2007</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maluku Tenggara Barat | 3.917        | 4.279        | 4.708        | 5.118        | 5.761        | 6.662        |
| Maluku Tenggara       | 3.257        | 3.545        | 3.867        | 4.308        | 5.008        | 4.876        |
| Maluku Tengah         | 2.416        | 2.648        | 2.929        | 3.270        | 3.791        | 4.482        |
| Buru                  | 2.861        | 3.018        | 2.825        | 3.015        | 3.492        | 3.995        |
| Kepulauan Aru         | 3.791        | 4.106        | 4.435        | 4.782        | 5.306        | 6.002        |
| Seram Bagian Barat    | 2.733        | 2.990        | 3.276        | 3.604        | 4.112        | 4.742        |
| Seram Bagian Timur    | 2.220        | 2.405        | 2.592        | 2.775        | 3.146        | 36.200       |
| Maluku Barat daya     | -            | -            | 4.679        | 5.226        | 5.855        | 6.838        |
| Buru Selatan          | -            | -            | 4.040        | 4.312        | 4.932        | 5.740        |
| Kota Ambon            | 8.244        | 8.928        | 9.523        | 10.314       | 12.276       | 14.126       |
| Kota Tual             | 3.887        | 4.132        | 4.407        | 4.788        | 5.513        | 6.333        |
| <b>MALUKU</b>         | <b>4.022</b> | <b>4.307</b> | <b>4.726</b> | <b>5.245</b> | <b>6.088</b> | <b>7.097</b> |

Sumber: BPS, 2013

## C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

### 1. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah dan prospek di masa mendatang. Struktur perekonomian Maluku tahun 2013 didominasi sektor pertanian, perdagangan dan jasa-jasa. Pembangunan di wilayah ini fokus pada sektor ekonomi unggulan seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata yang merupakan motor penggerak utama, pertumbuhan perekonomian daerah. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah (Tabel 2).

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

| No. | Lapangan Usaha               | Distribusi Persentase (%) |                   |
|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------|
|     |                              | PDRB ADHB                 | PDRB ADHK<br>2000 |
| 1.  | Pertanian                    | 28,64                     | 30,00             |
| 2.  | Pertambangan                 | 0,76                      | 0,79              |
| 3.  | Industri Pengolahan          | 4,48                      | 4,82              |
| 4.  | Listrik, Gas, Air Minum      | 0,50                      | 0,48              |
| 5.  | Konstruksi                   | 1,94                      | 1,92              |
| 6.  | Perdagangan, Hotel, Restoran | 28,72                     | 26,39             |
| 7.  | Angkutan, Telekomunikasi     | 10,01                     | 10,85             |
| 8.  | Keuangan                     | 4,00                      | 5,00              |
| 9.  | Jasa-jasa                    | 20,94                     | 19,77             |
|     |                              | 100,00                    | 100,00            |

Sumber: BPS, 2013

Pada analisis sektor basis, sektor pertanian memiliki peran yang kuat dalam perekonomian. Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah antara lain pertanian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa-jasa (Tabel 3). Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), komoditas tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, semuanya memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Subsektor angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta angkutan udara juga memiliki nilai *LQ* positif. Hal ini menunjukkan Maluku memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sub sektor tersebut, sebaliknya kelompok sektor industri pengolahan memiliki nilai *LQ* kurang dari satu ( $LQ < 1$ ).

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2008-2012**

| Lapangan Usaha   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|------|
| <b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b> | 2,34 | 2,32 | 2,38 | 2,39 | 2,39 |
| a. Tanaman Bahan Makanan                                 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,16 |
| b. Tanaman Perkebunan                                    | 3,16 | 3,25 | 3,15 | 3,17 | 2,98 |
| c. Peternakan  | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,67 |
| d. Kehutanan   | 1,83 | 1,78 | 1,55 | 1,60 | 1,61 |
| e. Perikanan   | 6,67 | 6,67 | 6,94 | 6,73 | 6,76 |
| <b>2. Pertambangan dan Pengalihan</b>                    | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi                      | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| b. Pertambangan Bukan Migas                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| c. Pengalihan  | 0,42 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 |
| <b>3. Industri Pengolahan</b>                            | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| a. Industri Migas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1). Pengilangan Minyak Bumi                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2). Gas Alam Cair (LNG)                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lapangan Usaha  | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| b. Industri Bukan Migas                               | 0,20        | 0,21        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
| <b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>               | <b>0,77</b> | <b>0,54</b> | <b>0,60</b> | <b>0,64</b> | <b>0,62</b> |
| a. Listrik  | 1,07        | 0,78        | 0,89        | 0,87        | 0,87        |
| b. Gas  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| c. Air Bersih   | 0,53        | 0,51        | 0,48        | 0,46        | 0,44        |
| <b>5. Konstruksi</b>                                  | <b>0,21</b> | <b>0,21</b> | <b>0,28</b> | <b>0,30</b> | <b>0,29</b> |
| <b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>           | <b>1,47</b> | <b>1,53</b> | <b>1,49</b> | <b>1,46</b> | <b>1,46</b> |
| a. Perdagangan Besar dan Eceran                       | 1,69        | 1,78        | 1,71        | 1,67        | 1,66        |
| b. Hotel  | 0,62        | 0,61        | 0,77        | 0,76        | 0,77        |
| c. Restoran   | 0,31        | 0,30        | 0,30        | 0,30        | 0,31        |
| <b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>                 | <b>1,35</b> | <b>1,24</b> | <b>1,16</b> | <b>1,11</b> | <b>1,07</b> |
| a. Pengangkutan                                       | 2,83        | 2,83        | 2,80        | 2,76        | 2,74        |
| 1). Angkutan Rel                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2). Angkutan Jalan Raya                               | 2,16        | 2,12        | 2,09        | 2,05        | 1,99        |
| 3). Angkutan Laut                                     | 5,56        | 5,73        | 5,83        | 5,73        | 5,81        |
| 4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan            | 5,43        | 5,53        | 5,51        | 5,50        | 5,57        |
| 5). Angkutan Udara                                    | 4,93        | 4,91        | 4,62        | 4,44        | 4,44        |
| 6). Jasa Penunjang Angkutan                           | 0,83        | 0,83        | 0,82        | 0,79        | 0,79        |
| b. Komunikasi   | 0,14        | 0,12        | 0,10        | 0,10        | 0,09        |
| <b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b> | <b>0,58</b> | <b>0,57</b> | <b>0,55</b> | <b>0,54</b> | <b>0,52</b> |
| a. Bank   | 0,35        | 0,36        | 0,35        | 0,34        | 0,33        |
| b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank                        | 1,00        | 0,96        | 0,90        | 0,92        | 0,87        |
| c. Jasa Penunjang Keuangan                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| d. Real Estat   | 1,11        | 1,09        | 1,06        | 1,04        | 1,00        |
| e. Jasa Perusahaan                                    | 0,03        | 0,03        | 0,03        | 0,02        | 0,02        |
| <b>9. Jasa-jasa</b>                                   | <b>2,00</b> | <b>1,99</b> | <b>2,01</b> | <b>2,07</b> | <b>2,11</b> |
| a. Pemerintahan Umum                                  | 4,16        | 4,20        | 4,33        | 4,52        | 4,81        |
| b. Swasta   | 0,32        | 0,30        | 0,30        | 0,28        | 0,27        |
| 1). Jasa Sosial Kemasyarakatan                        | 0,80        | 0,75        | 0,74        | 0,71        | 0,67        |
| 2). Jasa Hiburan dan Rekreasi                         | 0,20        | 0,18        | 0,17        | 0,21        | 0,19        |
| 3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga                  | 0,16        | 0,15        | 0,14        | 0,13        | 0,13        |

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian tenaga kerja di wilayah Provinsi Maluku, serta pengembangan sektor industri pengolahan non migas. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap

produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. *Kedua*, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014, meski pangsaanya masih kecil sektor industri pengolahan mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Perubahan jumlah orang yang bekerja di setiap sektor perekonomian selain sektor keuangan menunjukkan peningkatan (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian yang kurang produktif. Selain sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi juga memiliki potensi yang besar untuk di tingkatkan. Peran sektor ini cukup strategis dalam meningkatkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa di provinsi Maluku.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

| No.          | Lapangan Pekerjaan           | 2010          | 2014 (Feb)    | Perubahan    |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1            | Pertanian                    | 327020        | 343753        | 16733        |
| 2            | Pertambangan                 | 5872          | 7165          | 1293         |
| 3            | Industri Pengolahan          | 28248         | 36337         | 8089         |
| 4            | Listrik, Gas, Air            | 1095          | 1118          | 23           |
| 5            | Bangunan                     | 18790         | 26373         | 7583         |
| 6            | Perdagangan, Hotel, Restoran | 74274         | 89010         | 14736        |
| 7            | Angkutan & Telekomunikasi    | 32382         | 39867         | 7485         |
| 8            | Keuangan                     | 5736          | 5389          | -347         |
| 9            | Jasa-Jasa                    | 74485         | 131063        | 56578        |
| <b>Total</b> |                              | <b>567902</b> | <b>680075</b> | <b>39393</b> |

Sumber: BPS, 2014

## 2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah pada konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih besar dari 70 persen (Tabel 5). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah hanya berkontribusi di bawah 10 persen. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Maluku memiliki nilai strategis dan potensi unggulan untuk mengembangkan investasi. Potensi unggulan Maluku meliputi sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, energi, dan sumber daya mineral. Keberagaman potensi dan komoditas Maluku memerlukan sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan para stakeholder lainnya untuk mengembangkan perekonomian Provinsi Maluku. Hal ini akan menjamin berkembangnya arus perdagangan dan investasi di Provinsi Maluku yang dapat memperkuat daya saing daerah.

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan 2013**

| No.   | Lapangan Usaha           | Distribusi Persentase (%) |                |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|       |                          | PDRB ADHB                 | PDRB ADHK 2000 |
| 1.    | Konsumsi Rumah Tangga    | 72,96                     | 58,87          |
| 2.    | Konsumsi Lembaga Nirlaba | 1,62                      | 10,77          |
| 3.    | Konsumsi Pemerintah      | 37,74                     | 22,61          |
| 4.    | PMTB                     | 7,08                      | 4,25           |
| 5.    | Perubahan Stok           | 1,73                      | 10,77          |
| 6.    | Ekspor                   | 21,70                     | 10,77          |
| 7.    | Impor                    | 42,82                     | 18,04          |
| Total |                          | 100,00                    | 100,00         |

Sumber : BPS, 2013

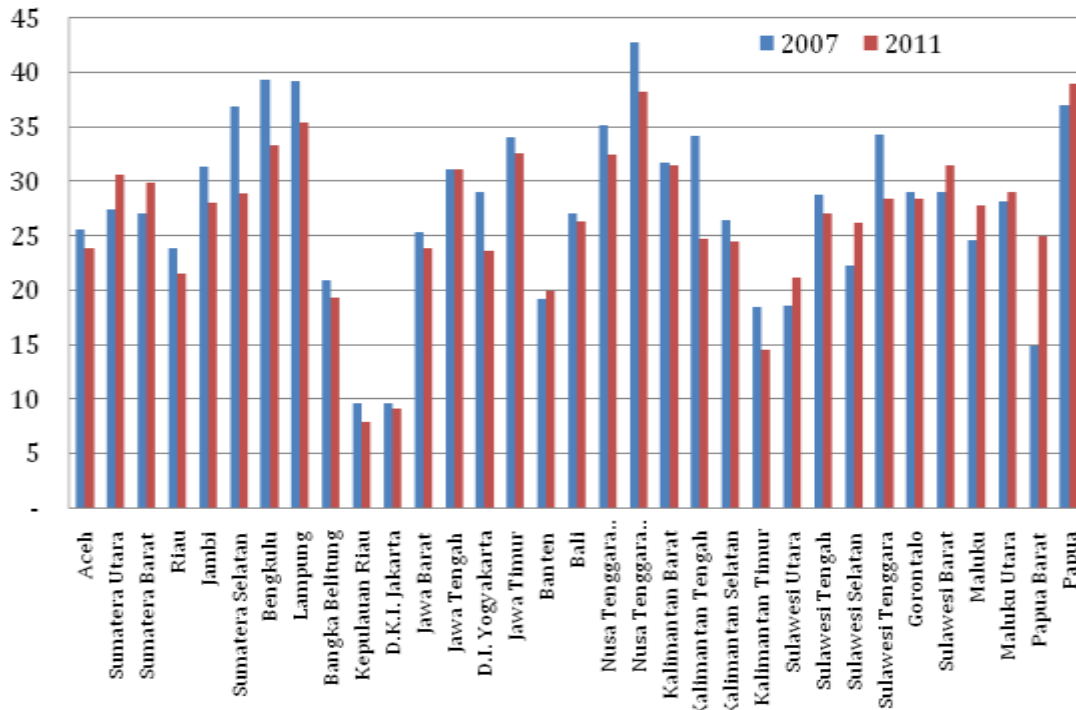
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Maluku telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemementasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

### 3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Maluku meningkat dari tahun 2007 dan mencapai 28 persen pada tahun 2011 dan tergolong tinggi secara nasional (Gambar 9).

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri yang berbasis agrobisnis dan agroindustri.

**Gambar 9**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Sistem transportasi antarpulau di Wilayah Kepulauan Maluku yang mendukung Posisi Maluku dengan kondisi relatif terisolir dan merupakan wilayah kepulauan adalah transportasi laut dan penyebrangan yang saat ini masih terbatas. Sementara untuk interkoneksi transportasi darat secara keseluruhan wilayah Maluku dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 7.218 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di Maluku untuk mendukung transportasi darat belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6). Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyebrangan untuk mendukung transportasi antar pulau masih belum memadai dan kualitasnya relatif masih kurang baik.

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan daerah Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Maluku relatif



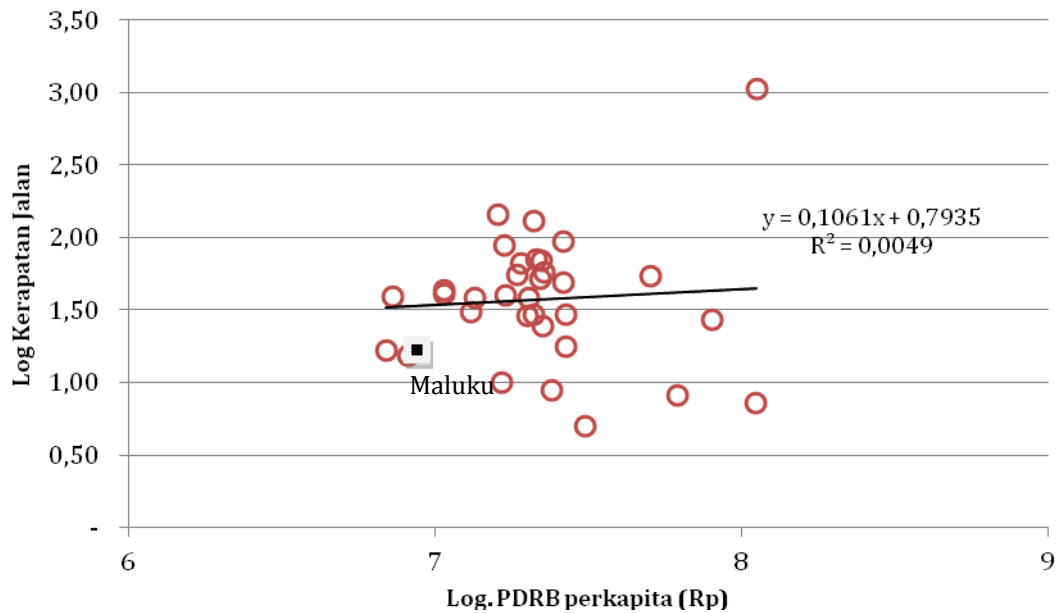
tidak lebih baik dibandingkan perekonomian dengan tingkat pendapatan perkapita yang sama. Dengan demikian panjang jalan merupakan permasalahan utama bagi Maluku

**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

| No        | Provinsi             | PDRB per kapita<br>(Ribu Rp) | Kerapatan<br>Jalan |
|-----------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1         | DKI Jakarta          | 111.913                      | 1.068,36           |
| 2         | DIY                  | 16.054                       | 146,56             |
| 3         | Bali                 | 20.948                       | 130,28             |
| 4         | Jawa Timur           | 26.274                       | 95,37              |
| 5         | Jawa Tengah          | 16.864                       | 88,75              |
| 6         | Jawa Barat           | 21.274                       | 72,08              |
| 7         | Sulawesi Selatan     | 22.151                       | 69,68              |
| 8         | Banten               | 19.038                       | 66,81              |
| 9         | Sulawesi Utara       | 22.624                       | 57,89              |
| 10        | Lampung              | 18.460                       | 56,44              |
| 11        | Kep. Riau            | 50.174                       | 54,95              |
| 12        | Sumatera Barat       | 22.035                       | 52,36              |
| 13        | Sumatera Utara       | 26.185                       | 49,50              |
| 14        | NTB                  | 10.691                       | 43,55              |
| 15        | Gorontalo            | 10.703                       | 40,85              |
| 16        | Sulawesi Barat       | 17.012                       | 40,62              |
| 17        | NTT                  | 7.236                        | 39,95              |
| 18        | Bengkulu             | 13.522                       | 38,99              |
| 19        | Aceh                 | 20.164                       | 38,76              |
| 20        | Sulawesi Tenggara    | 13.112                       | 30,71              |
| 21        | Kep. Bangka Belitung | 26.784                       | 29,93              |
| 22        | Sulawesi Tengah      | 21.052                       | 29,73              |
| 23        | Kalimantan Selatan   | 20.051                       | 29,28              |
| 24        | Riau                 | 79.786                       | 27,25              |
| 25        | Jambi                | 22.508                       | 24,81              |
| 26        | Sumatera Selatan     | 26.742                       | 17,86              |
| 27        | Maluku Utara         | 6.929                        | 16,72              |
| <b>28</b> | <b>Maluku</b>        | <b>8.134</b>                 | <b>15,39</b>       |
| 19        | Kalimantan Barat     | 16.421                       | 10,00              |
| 30        | Kalimantan Tengah    | 23.987                       | 8,96               |
| 31        | Papua Barat          | 61.462                       | 8,24               |
| 32        | Kalimantan Timur     | 111.210                      | 7,22               |
| 33        | Papua                | 30.713                       | 5,06               |
|           | <b>Indonesia</b>     | <b>33.531</b>                | <b>25,99</b>       |

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Maluku relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Maluku sudah mencapai di atas 50 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

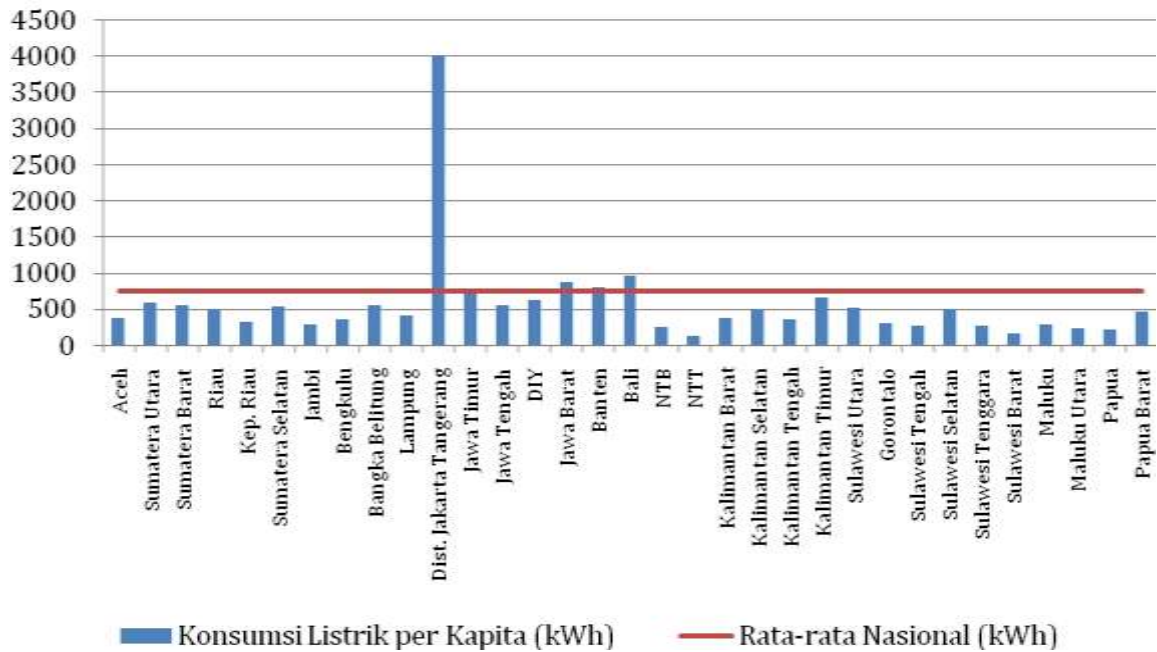
**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

| PROVINSI  | JENIS PERMUKAAN JALAN |    |         |    |       |   |         |   | Total  |     |
|-----------|-----------------------|----|---------|----|-------|---|---------|---|--------|-----|
|           | Aspal                 |    | Kerikil |    | Tanah |   | Lainnya |   |        |     |
|           | Km                    | %  | Km      | %  | Km    | % | Km      | % | Km     | %   |
| Maluku    | 1.308                 | 81 | 173     | 11 | 121   | 8 | 10      | 0 | 1.612  | 100 |
| INDONESIA | 42.284                | 79 | 5018    | 9  | 3504  | 7 | 2836    | 5 | 53.642 | 100 |

Sumber: BPS, 2012

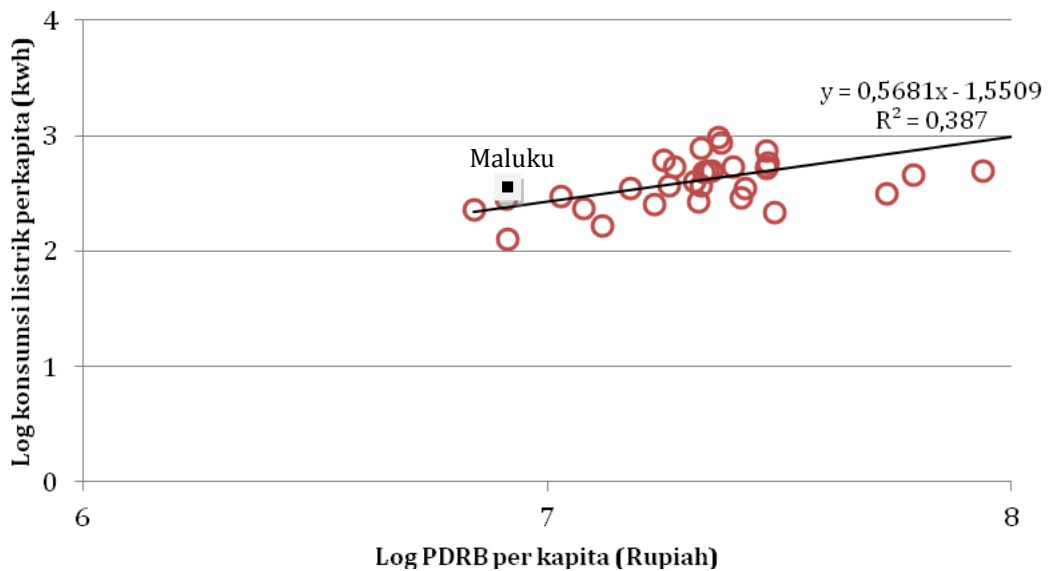
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Maluku termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



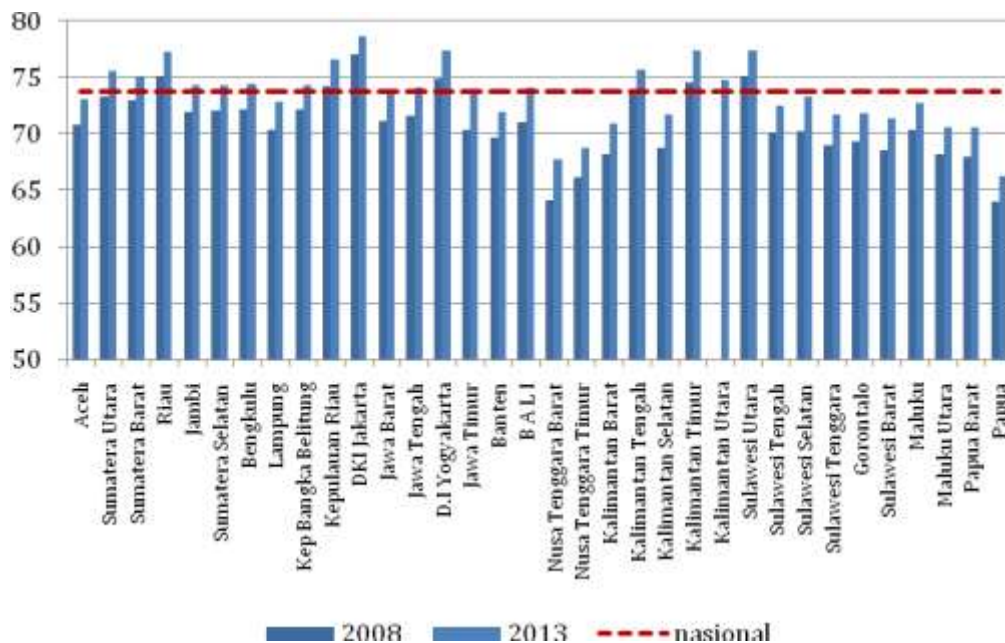
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

## 5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Maluku yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

IPM Maluku menduduki peringkat ke-22 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 72,70. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 67,0 tahun pada tahun 2008 menjadi 67,88 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Maluku meningkat dari 8,60 tahun pada 2008 menjadi 9,20 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Maluku pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 98,12 menjadi 98,25 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 94,14.

**Gambar 13**  
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 41,75 persen pada tahun 2008 menjadi 52,39 persen pada tahun 2014. Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadi modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

| No.          | Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan | 2008             | 2014 (Feb)       | Perubahan      |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1            | ≤ SD                              | 561.502          | 613.530          | 52.028         |
| 2            | SMTP                              | 263.885          | 302.456          | 38.571         |
| 3            | SMTA Umum                         | 466.329          | 739.425          | 273.096        |
| 5            | Diploma I/II/III/Akademi          | 50.804           | 48.993           | (1.811)        |
| 6            | Universitas                       | 74.443           | 219.564          | 145.121        |
| <b>Total</b> |                                   | <b>1.416.963</b> | <b>1.923.968</b> | <b>507.005</b> |

Sumber: BPS, 2014

## 6. Rendahnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Maluku nilainya lebih kecil dari satu, menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Maluku, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan untuk nasional sebesar 0,92 menunjukkan sumber permodalan masyarakat secara nasional cukup memadai (Tabel 9).

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

| Wilayah  | Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp) | Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp) | Rasio Pinjaman terhadap Simpanan | Rasio PMTB terhadap Simpanan |
|----------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| Maluku   | 9.474  | 8.309  | 0,88                             | 0,10                         |
| Nasional | 3.575.891  | 3.322.683  | 0,92                             | 0,47                         |

Sumber: BPS, 2013

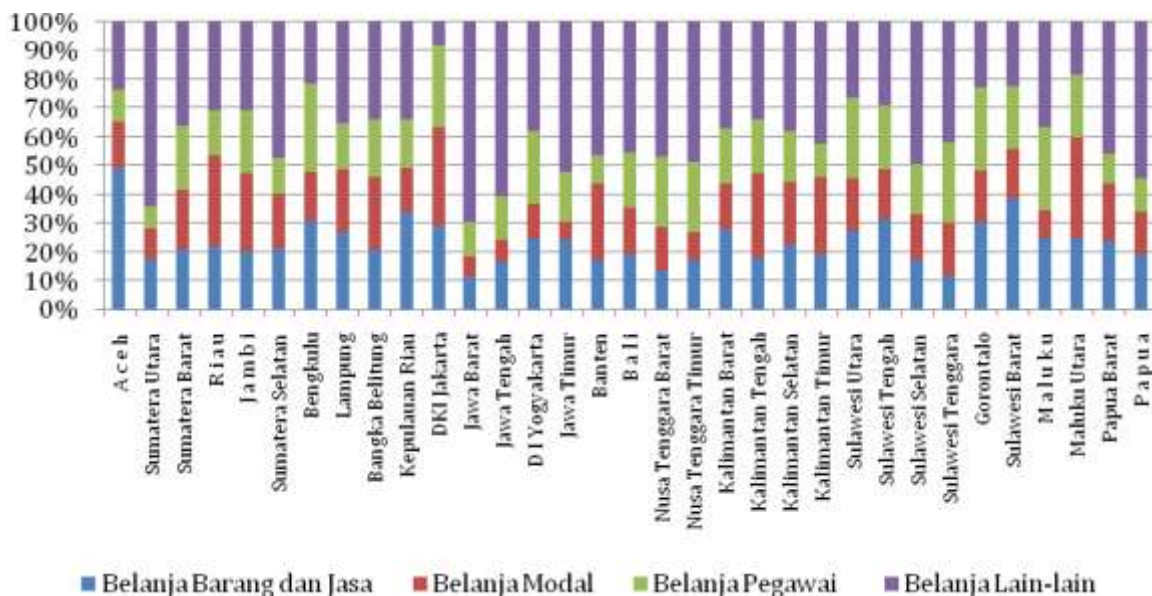
Rasio PMTB terhadap simpanan di Maluku nilainya kurang dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Maluku bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat

### 7. Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Maluku. Rasio belanja modal di Maluku pada tahun 2013 sebesar 9,81 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 29,17 (Gambar 14). Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

### D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Perekonomian wilayah Maluku relatif tertinggal namun prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, antara lain perkembangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan internal yang rendah, dan prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Maluku (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami sedikit peningkatan dari angka 0,31 menjadi 0,37,

lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Papua tergolong rendah secara nasional. Tingkat kesenjangan yang rendah akan menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Realisasi percepatan ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Maluku dan konektivitasnya dengan pusat pertumbuhan terdekat di Kepulauan Maluku dan Papua.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Maluku dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,9 – 8,6 persen dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah. Pada tahun 2015 prospek pertumbuhan ekonomi di Maluku akan membaik terutama dipengaruhi oleh faktor musiman yang mendorong investasi seiring penyelesaian proyek infrastruktur di wilayah ini. Pembangunan jalan lingkar di Maluku dan Maluku Utara turut mendukung pertumbuhan investas di wilayah ini.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Maluku harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 18,9 – 13,6 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 19,49 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Maluku Utara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 5,89 poin persentase atau 0,98 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Maluku Utara akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Maluku Utara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor batubara dan kelapa sawit.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- a. Industrialisasi sektor pertanian
- b. Pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Perbaikan iklim investasi daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan
- f. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah

### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan, dan pengembangan system transportasi maritime (laut dan penyebrangan antar pulau)
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah kepulauan dengan memanfaatkan sumber energy alternative ;
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah.